

## MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)

### Berkah atau Bencana Bagi Rakyat Papua?

#### **Ramai-ramai Berinvestasi di Papua**

Provinsi Papua dan Papua Barat kini menjadi pundi-pundi emas bagi pemerintah Indonesia dan investor asing untuk mengeruk keuntungan atas kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki provinsi paling ujung wilayah Timur Indonesia tersebut. Hal ini bisa dilihat dari realisasi penanaman modal asing di Papua yang mencapai 112% dengan nilai 5 milyar US dollar pada tahun 2008. Bahkan nilai investasi di sektor pertambangan mencapai 12,7% lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan nasional. Di luar pertambangan, masih banyak lagi potensi yang belum tergarap seperti, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang saat ini sedang dilirik para investor baik asing maupun dalam negeri.

Belum lama ini Pemerintah Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Perdagangan bersama pemerintah Australia Bagian Utara untuk pengembangan agrobisnis di Papua. Hasil produk agribisnis tersebut seperti, sayuran, buah-buahan, beras, jagung, dan lain-lain akan dipasok ke Freeport sebagai perusahaan nasional yang memegang peranan penting perputaran roda perekonomian Papua.

Rencana kerjasama investasi lain yang menimbulkan gelisahan dan penolakan dari rakyat Papua sendiri adalah proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek ini telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, John Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010. MIFEE merupakan pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pemerintah melibatkan 32 investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Di antara investor tersebut adalah Medco, PT Bangun Tjipta Sarana, Artha Graha, Come-Xindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, Wolo Agro Makmur, dan investor asal Arab Saudi dari Binladen Group yang akan taruh modal sebesar 4,37 miliar US dollar. Bahkan dikabarkan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis akan berkunjung untuk melihat proyek MIFEE. Para investor tersebut diajak untuk mengelola lahan seluas 1.282.833 ha yang berdasarkan rekomendasi Badan Penataan

Ruang Nasional (BKPRN) layak dikembangkan menjadi kawasan pertanian pangan dan bahan bakar hayati dalam skala luas.

Pemerintah memiliki mimpi bila proyek MIFEE berjalan dengan baik maka pada tahun 2030, Indonesia akan mempunyai tambahan cadangan pangan seperti, beras 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ekor, gula 2,5 juta ton, dan CPO 937.000 ton per tahun. Sedangkan keuntungan yang diperoleh daerah adalah PDRB per kapita Merauke terdongkrak menjadi 124,2 juta per tahun pada tahun 2030. Devisa negara juga bisa dihemat hingga Rp. 4,7 triliun melalui pengurangan impor pangan.

Dalam rangka mendukung proyek MIFEE, pemerintah membuat payung hukum agar proyek tersebut dapat berjalan, produk hukum tersebut di antaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan di Luar Kegiatan Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah (PP) No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Inpres No.5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008–2009 dan Raperda Kabupaten Merauke Tahun 2009 Tentang Merauke Integrated Food and Energy Estate.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Merauke nampaknya berambisi untuk menjalankan proyek MIFEE ini. Tidak lagi peduli dengan persoalan–persoalan laten yang selama ini mengganjal hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua mengenai persoalan diskriminasi, ketidakadilan, dan ketertinggalan sehingga menimbulkan konflik sosial–politik yang berujung pada kekerasan. Pemerintah juga melupakan pengalaman kegagalan proyek sejuta lahan yang mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian pangan pada masa pemerintahan Suharto yang berakhir ditinggalkannya proyek tersebut tanpa ada kelanjutannya. Kecenderungannya, apa yang akan dilakukan pemerintah dengan MIFEE ini cepat atau lambat akan menuai persoalan dan protes dari masyarakat.

### **Kerusakan Alam**

Dari 1,28 juta ha lahan yang diperuntukkan proyek MIFEE, ternyata sebanyak 90,2% berlokasi di dalam kawasan hutan yang telah diplot menjadi 10 kluster dan tersebar di 16 distrik. Delapan di antaranya berada di kabupaten Merauke, sedangkan sisanya masuk ke dalam distrik di kabupaten Mappi dan kabupaten Boven Digul.

Menurut hasil riset Greenomics Indonesia, dari 1,28 juta ha itu, sebanyak 125.485,5 ha di antaranya adalah bukan berada di kawasan hutan. Hal ini berarti lahan seluas 1.157.347,5 ha merupakan kawasan hutan yang akan dikonversi secara massif menjadi lahan agrobisnis. Kawasan tersebut sesungguhnya masih berupa hutan yang menyimpan kayu alam, binatang buruan dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi penduduk pribumi setempat. Kabupaten Merauke memiliki luas 4,7 juta ha dan 95,3% adalah kawasan hutan. Namun pemerintah daerah justru memberikan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hutan dan perkebunan kepada investor, bukan pada rakyat Papua. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan yang telah menandatangani kesepakatan pemanfaatan hutan yang berada di 10 kluster untuk kemudian dilepaskan menjadi areal sentra pangan dan energi dan dibagi-bagikan ke investor.

Kawasan hutan yang kini dialihfungsikan menjadi areal proyek MIFEE, selain berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi rakyat lokal juga menjadi sumber penyimpanan air untuk kota Merauke. Penebangan hutan yang terjadi mengakibatkan hilangnya atau keringnya sumber-sumber air bagi keperluan hidup masyarakat sehari-hari. Dampak negatif kehadiran proyek MIFEE ini mulai dirasakan masyarakat setempat. Di Kampung Boepe, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, masyarakat pribumi sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih, dan makanan pokok mereka yaitu sagu. Hal ini karena PT Medco Papua Industri Lestari, salah satu anak perusahaan Medco Group ini sudah membabat habis hutan dan sumber-sumber makanan pokok rakyat setempat. Selain itu limbah hasil pengolahan kayu dibuang disungai sehingga mencemari sumber air satu-satunya di Kampung Boepe. Perusahaan ini dapat bertindak leluasa karena merasa sudah mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan masuk ke Merauke untuk pengolahan “Wood Chips” kapasitas 2 juta meter kubik senilai Rp. 409,5 miliar.

Sebenarnya modus sebagaimana yang diceritakan di atas sudah lama terjadi dalam permainan industri kehutanan. Di balik konversi lahan hutan menjadi pertanian atau perkebunan adalah penebangan dan penjualan kayu secara besar-besaran oleh pemegang HPH/HGU. Karena dengan memanfaatkan nilai kayu dan sumberdaya alam hutan lainnya perusahaan telah memperoleh keuntungan di awal sebelum proyek yang sesungguhnya mulai.

### **Menebar Benih Konflik Sosial**

Bukan hanya alam Papua yang menjadi korban MIFEE tapi proyek ini juga berpotensi besar mempertajam konflik yang telah ada sebelumnya. Luka-luka lama terbuka lagi seperti, rasa ketidakadilan, eksploitasi, dan penyingkiran, sehingga gejolak protes dan perlawanan dari berbagai kalangan sudah mulai terlihat menolak MIFEE.

Protes dan penolakan datang dari Dewan Adat Wilayah V, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Adat, Johannes Wob (52), mengatakan bahwa kehadiran industri pertanian berpotensi mengancam kelestarian adat masyarakat Merauke. Seringkali dalam proses negosiasi masyarakat berada dalam posisi lemah karena ketidaktahuan dalam peraturan yang diciptakan pemerintah dan investor. Meskipun sudah ada peraturan daerah tentang tanah ulayat, yaitu tidak boleh diperjualbelikan namun nyatanya saat ini ratusan hektar tanah milik warga terlepas hanya dengan diganti sebuah motor atau motor temple. Bahkan dalam banyak kasus tanah ulayat yang diambil alih hanya dibayar Rp. 8 per meternya.

Dari data yang dikumpulkan kalangan LSM di Merauke, dana gantirugi sebenarnya bernilai milyaran rupiah namun yang sampai ke anggota komunitas hanya Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000. Belum diketahui kemana sebagian besar dana pembebasan lahan tersebut berada. Pola perampasan dan manipulasi lahan seperti ini sebenarnya mengulangi cara-cara lama semasa pemerintahan Orde Baru yaitu mengambil tanah adat dengan cara-cara halus dan kekerasan. Persoalan ini cepat atau lambat akan memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dalam pembebasan lahan.

Sebagaimana keluhan yang diungkap oleh Christian Basik (38), seniman dan tokoh pemuda di Wendu, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, seperti yang disampaikannya kepada Kompas (06/08/2010), bahwa dia telah lama menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah, terutama pemerintah kabupaten Merauke. “Mereka lebih peduli kepada investor dari pada rakyatnya sendiri. Lihat saja, di sini tidak ada listrik sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Wendu selalu gelap. Dulu di sini ada hutan sagu kecil, tetapi sudah digusur proyek jalan” , katanya.

Salah seorang warga lain, Martin, layak kesal lantaran dana milyaran rupiah justru digelontorkan untuk membangun akses ke wilayah tidak berpenduduk untuk kepentingan investor agribisnis. Mereka kesal karena banyak lahan di sekitar Wendu dan Serapu dibiarkan terbengkalai oleh investor yang mengambil lahan dari warga. Baginya, program pengembangan pertanian pangan dan bahan bakar hayati yang berskala luas di bawah naungan MIFEE, tidak banyak menghadirkan manfaat bagi warga setempat. Sebaliknya, tanah dan hutan sagu kami hilang, ujanya. Tempat-tempat keramat yang menjadi pusat kosmologi masyarakat adat suku Malind-Anim tercemar karena batas-batas wilayah adat terbongkar akibat pembukaan lahan. Suatu saat nanti, hal itu akan menimbulkan konflik antar warga, kata Christianus.

Konflik tidak hanya terjadi secara vertikal yakni antara rakyat Papua dengan pemerintah dan investor, tapi juga horizontal antara rakyat Papua dengan pendatang akibat kecemburuan sosial-ekonomi. Dengan proyek MIFEE ada rencana perusahaan memasukkan tenaga kerja dari luar Papua sebesar 4 juta orang yang dipekerjakan sebagai buruh tani. Ini akan menambah kelipatan tenaga kerja non pribumi, sementara jumlah penduduk asli Merauke saat ini sekitar

52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 orang total penduduk kabupaten Merauke (Papua dan non Papua). Bila hal ini dijalankan maka yang akan terjadi adalah adanya proses genosida atau pemusnahan komunitas pribumi secara sistematis.

Tingkat pendidikan yang rendah rata-rata hanya lulusan sekolah dasar juga menjadi persoalan tersendiri bagi rakyat pribumi, mereka kalah bersaing dengan para pekerja pendatang dari luar Papua. Sebagaimana pengakuan Marius Moiwend yang dikutip Kompas (06/08/2010), warga desa Sanggase, Distrik Okaba, Merauke, mengatakan bahwa ia dan beberapa rekannya mencoba melamar menjadi satpam di salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek MIFEE, namun ditolak karena tidak memiliki ijazah SMP. Ijazah SD hanya untuk penerimaan gelombang pertama dan kedua, kata salah seorang petugas perusahaan.

Masyarakat sebenarnya bukan tidak ingin berkembang, selama ini mereka telah berulang kali mengusulkan kepada pemerintah agar mau membuat sekolah darurat untuk menampung anak-anak mereka, namun hingga saat ini belum dipenuhi juga, malah sekarang beli pesawat terbang kata Damianus Yorwen (45) yang merujuk pada tiga jet 737-300 yang dibeli pemerintah kabupaten Merauke. Kenyataan ini memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat asli Merauke akan semakin termarjinalkan dan mereka akan menjadi penonton hiruk pikuk dan kemajuan proyek MIFEE.

### **Industri Pangan untuk Siapa?**

Bila dikaji lebih jauh mengenai keberadaan proyek MIFEE, sebenarnya patut diajukan beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, apa yang menjadi alasan pemerintah mengambil model MIFEE sebagai jalan menuju ketahanan pangan? Kedua, mengapa Papua menjadi pilihan lokasi mega proyek tersebut?

Mengenai mimpi pemerintah tentang menuju ketahanan pangan pada tahun 2030 melalui proyek MIFEE, sebenarnya tidak realistis dan tidak relevan dengan komitmen dan strategi yang selama ini dikumandangkan pemerintah. Dibandingkan periode pemerintahan Suharto, pemerintahan sekarang nampak tidak lagi mempercayakan urusan produksi pangan kepada rumah tangga petani yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Program swasembada pangan yang terjadi pada pertengahan 1980-an sesungguhnya tidak terlepas dari peranan penting rumah tangga petani. Walaupun belum terlihat jelas mengenai dampaknya bagi petani kecil, namun keberhasilan tersebut telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian lebih baik dari sebelumnya dan mempengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin pedesaan.

Setelah sukses swasembada pangan tahun 1986, pemerintah Orde Baru mencoba strategi baru untuk meningkatkan produksi pangan melalui mega proyek sejuta lahan di Kalimantan.

Proyek tersebut langsung dikelola dan dikendalikan pemerintah pusat dengan nilai investasi yang cukup besar. Namun apa yang terjadi kemudian? Mega proyek tersebut gagal di tengah jalan dan kini tidak terdengar lagi.

Hampir sama dengan pendahulunya, kini pemerintahan sekarang lebih mengandalkan swasta untuk mengambil peranan peningkatan produksi pangan. Dibukanya ijin bagi industri-industri pangan skala luas menunjukkan bahwa rumah tangga petani tidak lagi memegang peranan penting untuk menjaga ketahanan pangan. Sebenarnya bagi petani kecil tidak masalah karena selama ini produksi pertanian yang mereka lakukan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Namun persoalannya adalah anggaran baik subsidi maupun pinjaman bunga rendah yang disediakan bank jatuh kepada para pengusaha-pengusaha pertanian besar. Rumah tangga tani semakin sulit menjangkau akses kredit pertanian yang selama ini juga sulit mereka dapatkan.

Sebaliknya, pemerintah saat ini memberi akses dan kemudahan yang cukup besar kepada pengusaha pertanian untuk mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk di dalamnya perolehan tanah pertanian dalam skala ribuan bahkan jutaan hektar, seperti yang terjadi di Merauke dengan proyek MIFEE-nya. Bahkan tidak peduli status lahannya bagaimana, entah itu tanah negara atau tanah kehutanan, bila memungkinkan pemerintah dengan mudah melepas dan memberikannya kepada para pengusaha pertanian. Bandingkan dengan nasib petani kecil atau buruh tani yang sejak turun temurun hidup dalam pertanian namun sampai saat ini tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Perjuangan mereka untuk mendapatkan lahan pertanian yang layak (1-2 ha) lebih banyak ditanggapi reaksioner dan seringkali dengan cara kekerasan aparat negara. Ketidakadilan ini terus berlanjut sampai sekarang.

Alasan kedua mengenai pilihan lokasi di Papua, ada sikap yang kontradiktif antara gagasan dan kenyataannya. Proyek MIFEE sama sekali tidak sensitif dengan latar belakang sejarah dan realitas yang ada di masyarakat. Mereka berbicara tujuan proyek untuk mencapai ketahanan pangan nasional, pertanyaannya adalah pangan untuk siapa? Makanan pokok rakyat Papua adalah sagu yang diperoleh dari hutan sagu. Kini hutan-hutan tersebut ditebangi dan digantikan tanaman pangan industri seperti padi, jagung, sawit, dan tanaman yang berorientasi ekspor. Pemerintah berambisi mengejar perolehan devisa dari tanaman ekspor tersebut namun membiarkan rakyat Papua berada dalam ancaman kelaparan dan kehilangan sumber bahan makanan pokoknya. Dalam berbagai media massa dipublikasikan tentang krisis pangan di sebagian wilayah Papua, namun pemerintah bukannya mencari jalan keluar yang arif dan bijaksana, sebaliknya menjerumuskan rakyat Papua ke dalam krisis pangan berkepanjangan. Dengan rusaknya ekosistem karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan maka persoalan akan semakin bertambah dan lebih kompleks, tidak hanya soal krisis pangan tapi juga konflik sosial yang akan menyertainya.

Proyek MIFEE mengingatkan kita tentang mega proyek yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1870. Pemerintah mengambil tanah-tanah pertanian rakyat dan tanah ulayat untuk dirubah menjadi perkebunan-perkebunan besar yang berorientasi ekspor. Demikian juga dengan sistem *culturstelsel* atau tanam paksa yang dijalankan demi mengejar perolehan devisa negara kolonial telah menghancurkan sistem dan tradisi pertanian rakyat serta merusak sistem ulayat yang telah hidup ratusan tahun. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di pedesaan sehingga memicu protes dan perlawanan petani di mana-mana.

Apalagi sejarah masyarakat Papua sejak dulu sampai sekarang masih menyimpan persoalan yang belum terselesaikan dengan pemerintah Indonesia. Perlakuan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua khususnya penduduk asli menciptakan luka dan kecurigaan yang cukup besar. Karena memang kenyataannya Papua selalu tertinggal dalam laju pembangunan nasional. Namun untuk mempercepat ketertinggalan dan kemiskinan tersebut jalan keluarnya bukan berarti harus mengundang investor sebanyak-banyaknya untuk mengubah dan mengurus sumberdaya alam yang ada. Hal ini sama saja mengulangi praktek-praktek sejarah kolonialisme yang kita tentang sampai sekarang. Pemerintah Pusat maupun daerah juga tidak bisa memiliki kewenangan tunggal dalam menentukan arah pembangunan di Papua. Mereka tidak berhak untuk menetapkan dan menyerahkan tanah-tanah dan hutan-hutan adat kepada pihak luar. Bagaimanapun juga rakyat Papua mempunyai hak untuk turut menentukan jalannya pembangunan di Papua. []

COPYRIGTH@BINA DESA, 2012. EDITOR BY; SABIQ CAREBESTH & SYAIFUL BAHARI